

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP NAGARI)
TAHUN 2020



NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Nagari diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) sebagai penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu Nagari juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Nagari yang merupakan bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPNagari adalah Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bamus sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBNagari tahun anggaran bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan Nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah Nagari ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2020 adalah :

- a. Nagari memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJM Nagari tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum Nagari sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Nagari;
- c. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Nagari;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKP Nagari adalah :

- a. RKP Nagari sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah Nagari tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi Nagari saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Nagari serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari)

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 8 Nomor 2010);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 88 Nomor 2018);
18. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Sambungo Tahun 2017 Nomor 01);
19. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari (Lembaran Nagari 02 Tahun 2019 Nomor 02);
20. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Sambungo Tahun 2018 Nomor 2);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Sambungo tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Sambungo tahun 2018-2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Nagari. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Pendapatan Asli Nagari (PAN)	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
2	Dana Desa	804.372.000,00	804.372.000,00	-	
3	Bagi hasil pajak dan Retribusi	24.105.607,00	27.499.351,90	3.393.744,90	
4	Alokasi Dana Desa	432.611.100,00	432.726.908,00	115.808,00	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
6	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	
7	Hibah	-	-	-	
8	Sumbangan Pihak ketiga	-	-	-	
9	Pendapatan Lain-lain	984.500,00	984.500,00	-	
	Jumlah	1.275.573.207	1.279.082.759,9	3.509.552,90	

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	439.597.382,43			
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	650.696.500,00			
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	77.192.508,19			

4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	76.233.314,91			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	5.000.000,00			
	Jumlah	1.248.719.705,53			

2. Realisasi Belanja

3. Kebijakan Pemerintah Nagari

Beberapa kebijakan pemerintah Nagari yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah Nagari tahun sebelumnya antara lain :

- a. Perubahan kegiatan pada beberapa bidang karena adanya penambahan dan pengurangan anggaran pada tahun berjalan dan kegiatan yang direncanakan kurang representatif pada tahun berjalan.
- b. Memprioritaskan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan karena adanya keberpihakan pada kegiatan masyarakat sehingga diperlukan penyelerasan kegiatan pada tahun berjalan.
- c. Melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada RKPNagari Tahun Anggaran sehingga lebih memaksimalkan kegiatan yang sudah disepakati pada musrenbang Nagari

4. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

Secara umum kegiatan yang sudah disepakati pada Musyawarah Rancangan Pembangunan Nagari pada tahun anggaran 2019 sudah terpenuhi dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, sementara pada kegiatan DU-RKP masih belum dan selalu berusaha untuk mencari trobosan-trobosan sehingga harapan besar kegiatan-kegiatan dimaksud bisa terwujud sesuai dengan visi misi pemerintahan Nagari.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP NAGARI

Proses penyusunan RKP Nagari tidak terlepas dari proses musyawarah Nagari yang melibatkan Pemerintah Nagari, Bamus dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Nagari, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke Nagari dan program/kegiatan yang akan dilakukan di Nagari pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Nagari yang bersumber dari APBN
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Dana Nagari senilai Rp. 804.372.000,00
2. Rencana alokasi dana Nagari (ADD).
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
 - Alokasi Dana Nagari senilai Rp. 432.726.908,00
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2019
 - Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Dana bagi Hasil senilai Rp. 27.499.351,00
4. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tahun 2019
 - Rencana bantuan keuangan.

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

B. Penyusunan RKP Nagari

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Sambungo Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Wali Nagari membentuk dan atau mengukuhkan kembali Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Wali Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
6. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang

sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Masyarakat Nagari dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
8. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		5	Penyediaan Tunjangan BPD
		6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
		7	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB-P2
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
3	Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Adminitrasi Umum dan Kependudukan
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBdes (reguler)

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB desa, APB desa Perubahan, LPJ dll)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Desa (Honor, Pakaian dll)
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Praga
2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa
		4	Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		2	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan	1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan

Hidup		
6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

1 Sub Bidang Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes
	2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan Dll)
3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
	2	Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat
	2	Pembinaan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
	2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk pertanian/peternakan
3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUMdesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)

5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Keadaan Darurat
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Penanganan Keadaan Mendesak

2. Musyawarah Nagari

Dokumen RKP Nagari yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus, dan unsur masyarakat pada tanggal 14 November 2019, dan Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Nagari dan dikuatkan dengan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2019.

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari

Kode	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			Lokasi	Volume	Prakiraan Biaya & Sumberdana
	BIDANG	SUB. BIDANG	JENIS KEGIATAN			JUMLAH
2.1	BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	Nagari Sambungo	12 Bulan	51.600.000
			2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Nagari Sambungo	12 Bulan	284.100.000
			3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari	Nagari Sambungo	12 Bulan	7.274.052
			4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Nagari Sambungo	12 Bulan	58.751.145,81
			5 Penyediaan Tunjangan BPD	Nagari Sambungo	12 Bulan	68.700.000
			6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Nagari Sambungo	12 Bulan	11.088.000
			7 Penyediaan Insentif Pemungutan PBB-P2	Nagari Sambungo	1 Paket	2.152.500
		2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Nagari Sambungo	3 Kali	4.702.340,52
		3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Nagari Sambungo	12 Bulan	1.800.000

	n Sipil, Statistik dan Kearsipa n					
4	Penyelen ggaraan Tata Praja Pemerint ahan, Perencan aan, Keuanga n dan Pelapora n	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBdes (reguler)	Nagari Sambungo	1 Paket	2.695.000
		2	Penyelenggaraan MusyawarahDesa Lainnya (Musdus,rembug desa non reguler)	Nagari Sambungo	1 Paket	2.695.000
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Nagari Sambungo		3.686.000
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdesa,APBdesa Perubahan, LPJ dll)	Nagari Sambungo		2.740.400
JUMLAH						501.984.437

Kode	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			Lokasi	Volume	Prakiraan Biaya & Sumberdana
	BIDANG	SUB. BIDANG	JENIS KEGIATAN			JUMLAH
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1 Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Nonformal Desa (Honor, Pakaian dll)	Kp. Silaut VI	36 Bulan	109.560.000
			2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Nagari Sambungo	120 Bulan	1.000.000
			3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Praga pembangunan Pagar Tk/Paud	Kp. Silaut VI	1 Paket	52.279.000
		2 Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	Nagari Sambungo	180 Bulan	3.300.000
			2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Nagari Sambungo	36 Bulan	33.560.000
			3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Nagri Sambungo	12 Bulan	1.000.000
			4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Nagari Sambungo	12 Bulan	20.321.250
		3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	1 Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Kp. Sambungo	1 Paket	16.368.000

		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Kp. Sambungo	700 M	70.886.000
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa	Kp. Silaut VI	1 unit	316.802.200
		4	Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa	Kp. Tanjung Sari	1 Punit	30.000.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Nagari Sambungo	1 Paket	40.000.000
		2	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Nagari Sambungo	5 Paket	22.500.000
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan	1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan			1.000.000
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)			4.914.414,91
JUMLAH						723.490.864,91

Kode	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN					Lokasi	Volume	Prakiraan Biaya dan Sumberdana
	BIDANG	SUB. BIDANG		JENIS KEGIATAN				JUMLAH
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Sub Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes	Nagari Sambungo	1 x 12 Bulan	5.100.000
				2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	7.300.000
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Nagari Sambungo	2 Kali	12.179.417,82
				2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan Dll)	Nagari Sambungo	1 Paket	16.500.000
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Nagari Sambungo	12 Bulan	8.820.000
				2	Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa			13.000.000
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa			15.000.000
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat				2.500.000
				Pembinaan PKK				6.826.000
			JUMLAH					

Kode	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				Lokasi	Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Dana
	BIDANG	SUB. BIDANG		JENIS KEGIATAN			JUMLAH
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Nagari Sambungo	1 Paket	6.699.000
				2 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk pertanian/peternakan			19.880.250
		2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	15.000.000
		3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Nagari Sambungo	1 Paket	14.400.000
		4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Nagari Sambungo	1 Paket	900.000
		5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1 Pelatihan Pengelolaan BUMdesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Nagari Sambungo	1 Paket	1.500.000
	JUMLAH						58.379.250

Kode	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya & sumber Dana
	BIDANG	SUB. BIDANG		JENIS KEGIATAN			JUMLAH
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulang an Bencana	1 Kegiatan Penanggulangan Bencana	Nagari Sambungo	1 Paket	45.000.000
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2 Penanganan Keadaan Darurat	Nagari Sambungo	1 Paket	240.000.000
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3 Penanganan Keadaan Mendesak	Nagari Sambungo	1 Paket	45.000.000
	JUMLAH						330.000.000

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran

C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Bidang	Asal Program		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	Vol	Lokasi	ANGGARAN
1	Ekonomi	1. APBD Kabupaten	1	Kegiatan pengadaan bibit Sapi unggul	1 Paket	Nagari Sambungo	750.000.000
			2	Pengadaan peralatan penangkapan ikan laut, Kapal, Mesin dan Lainnya	1 Paket	Nagari Sambungo	300.000.000
			3	Pengadaan Itik Petelur	1 Paket	Nagari Sambungo	25.000.000
		2. APBD Provinsi	1	Kegiatan Repalting Kebun Kelapa Sawit	1 Paket	Nagari Sambungo	1.000.000.000
			2	Pelatihan pembuatan BioGas	1 Paket	Nagari Sambungo	20.000.000
			3	Pelatihan budidaya Tanaman Holtikultura	1 Paket	Nagari Sambungo	25.000.000
		3. APBN	1	Pelatihan dan bantuan alat pengolahan pakan ternak	1 Paket	Nagari Sambungo	50.000.000
			2	Pelatihan dan pengadaan Alat-alat UMKM	1 Paket	Pasir Binjai	50.000.000
			3	Pelatihan Batik	1 Paket	Nagari Sambungo	100.000.000
2	FISIK	1. APBD Kabupaten	1	Pengeringan Priemer Jalan Lintas KTM Lusi – Pantai Sambungo	1 Paket	Nagari Sambungo	1.500.000.000
			2	Perbaikan irigasi Priemer dan Skunder Nagari Sambungo	1 Paket	Nagari Sambungo	1.500.000.000
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pantai		Nagari	2.000.000.000

	4	Pembangunan RTLH	1 Paket	Nagari Sambungo	100.000.000
	5	Pembangunan MCK	1 Paket	Nagari Sambungo	45.000.000
	6	Pembangunan Sarana dan Prasarana SD 11 Silaut	1 Paket	Nagari Sambungo	250.000.000
	7	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP 4 Silaut	1 Paket	Nagari Sambungo	250.000.000
2. APBD Provinsi	1	Perbaikan Irigasi Priemer dan Skunder Nagari Sambungo	1 Paket	Nagari Sambungo	1.500.000.000
	2	Pembangunan Homestay	1 Paket	Nagari Sambungo	200.000.000
	3	Pembangunan Perpustakaan SD 11 Silaut	1 Paket	Nagari Sambungo	200.000.000
	4	Pembangunan Jembatan	1 Paket	Nagari Sambungo	500.000.000
3. APBN	1	Pembangunan jalan dan jembatan penghubung Nagari Sambungo dan Nagari Air Hitam	1 Paket	Nagari Sambungo	6.000.000.000
	2	Pemb. Sarana Evakuasi Stunami/Selter	1 Paket	Nagari Sambungo	1.500.000.000
	3	Kelanjutan pembangunan KTM Lunang Silaut	1 Paket	Nagari Sambungo	20.000.000.000
	4	Pembangunan Talut Jalan Lintas KTM Lusi - Pantai Sambungo	1 Paket	Nagari Sambungo	1.000.000.000

			5	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Kapal Mini	1 Paket	Nagari Sambung o	2.000.000.000
3	SOSIAL BUDAYA	1. APBD Kabupaten	1	Pembangunan dan Rehab Mesjid dan Mushalla	1 Paket	Nagari Sambung o	150.000.000
			2	Pengadaan alat-alat kesenian	1 Paket	Nagari Sambung o	50.000.000
			3	Pelatihan organisasi Karang Taruna	1 Paket	Nagari Sambung o	25.000.000
		2. APBD Provinsi	1	Pembangunan dan Rehab Mesjid dan Mushalla	1 Paket	Nagari Sambung o	150.000.000
			2	Bantuan Tenda	1 Paket	Nagari Sambung o	100.000.000
		3. APBN	1	Pengadaan alat-alat kesenian	1 Paket	Nagari Sambung o	50.000.000
			2	Bantuan Ambulance	1 Paket	Nagari Sambung o	250.000.000

BAB V
DAFTAR USULAN RKP NAGARI

A. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari, yang diikuti dan dihadiri oleh Camat, Pendamping Desa dan Tim RKP, Pemerintah Nagari, Bamus, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Nagari bukan menjadi kewenangan Nagari;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh Nagari;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Nagari;

B. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

NO	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari				501.984.437
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	51.600.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	284.100.000
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	7.274.052
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	58.751.145,81
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	68.700.000

6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	11.088.000
7	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB-P2	Nagari Sambungo	1 Paket	Nagari	2.152.500
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Nagari Sambungo	1 Paket	Nagari	4.702.340,52
9	Pelayanan Adminitrasi Umum dan Kependudukan	Nagari Sambungo	12 Bulan	Nagari	1.800.000
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBdes (reguler)	Nagari Sambungo	1 Tahun	Nagari	2.695.000
11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non	Nagari Sambungo	3 Kali	Nagari	2.695.000
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Nagari Sambungo	1 Kali	Nagari	3.686.000
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdesa, APBdesa Perubahan, LPJ dll)	Nagari Sambungo	4 Kali	Nagari	2.740.400

N0	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari				723.490.864
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Nonformal Desa (Honor, Pakaian dll)	Kp. Silaut VI	36 Bulan	Guru	109.560.000
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Nagari Sambungo	120 Bulan	Guru	1.000.000
3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Praga pembangunan Pagar	Kp. Silaut VI	1 Paket	Murid	52.279.000
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	Kp. Silaut VI	1 Paket	Murid	3.300.000
5	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	Nagari Sambungo	1 Paket	Murid	33.560.000
6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Nagari Sambungo	180 Bulan	Kader	1.000.000
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Nagari Sambungo	36 Bulan	Kader	20.321.250
8	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Nagri Sambungo	12 Bulan	Kader	16.368.000
9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Nagari Sambungo	12 Bulan	Kader	70.886.000
10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa	Nagari Sambungo	24 Bulan	Kader	316.802.200
11	Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa	Nagari 'Sambungo	1 Paket	Lansia dan Balita	30.000.000

12	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Nagari Sambungo	1 Paket	Balita	40.000.000
13	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Nagari Sambungo	1 Paket	Ibu Hamil	22.500.000
14	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Kp. Silaut VI	200 M	Masyarakat	1.000.000
15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Kp. Sambungo	700 M	Masyarakat	4.914.414,91

N0	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				87.225.417
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes	Nagari Sambungo	1 x 12 Bulan	Masyarakat	5.100.000
2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	7.300.000
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	12.179.417,82
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan DII)	Nagari Sambungo	12 Bulan	Murid	16.500.000
5	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	8.820.000
6	Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	13.000.000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa	Nagari Sambungo	2 Kali	Pemuda Nagari	15.000.000
8	Pembinaan Lembaga Adat	Nagari Sambungo	1 Paket	Pemuda Nagari	2.500.000
9	Pembinaan PKK	Nagari Sambungo	12 Bulan	PKK	6.826.000

N0	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
D	Pemberdayaan Masyarakat Desa				58.379.250
1	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	6.699.000
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk pertanian/peternakan	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	19.880.250
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	15.000.000
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	14.400.000
5	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	900.000
6	Pelatihan Pengelolaan BUMdesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	1.500.000

N0	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan				330.000.0000
	1 Kegiatan Penanggulangan Bencana	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	45.000.000
	2 Penanganan Keadaan Darurat	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	240.000.000
	3 Penanganan Keadaan Mendesak	Nagari Sambungo	1 Paket	Masyarakat	45.000.000